



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS SEBELAS MARET

I. DATA PRIBADI

1. Nama : JAKA WINARNA
2. Jabatan : WAKIL DIREKTUR KEUANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
3. NHK : 727871

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 4.360.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/48 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 380.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 355 m2/200 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 1.260.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 373 m2/250 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 1.040.000.000
4. Tanah Seluas 155 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 280.000.000
5. Tanah Seluas 320 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
6. Tanah Seluas 250 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 166 m2/166 m2 di KAB / KOTA KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 103.000.000**

1. MOBIL, HONDA MOBILIO/SEDAN Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
2. MOTOR, HONDA BEBEK Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
3. MOTOR, HONDA BEBEK Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000



4. MOTOR, HONDA V1J02Q32L1 A/T SOLO Tahun 2022, HASIL
SENDIRI Rp. 29.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 42.150.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 125.620.748

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 4.630.770.748

III. HUTANG Rp. 100.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 4.530.770.748

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.